



RENCANA KERJA TAHUN 2025

DINAS PERINDUSTRIAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERINDUSTRIAN
TAHUN 2025



PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERINDUSTRIAN

Jl. DemangLebarDaun No. 2610 Palembang KodePos 30139 Telp. (0711) 446695, 5640447
Fax. (0711) 446695 Email { [HYPERLINK "mailto:disperindprovss.pep@gmail.com"](mailto:disperindprovss.pep@gmail.com) \h }

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 800/02/Perind/I/2025

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan pasal 15 ayat (3) Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dijabarkan dalam rancangan Rencana Kerja Tahunan SKPD;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan tentang Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2059 tentang Pembentukan Daerah Tk. I Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI No. 20 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 17 Serie E);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050 - 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 5 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026.
12. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 47 Tahun 2015 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan.

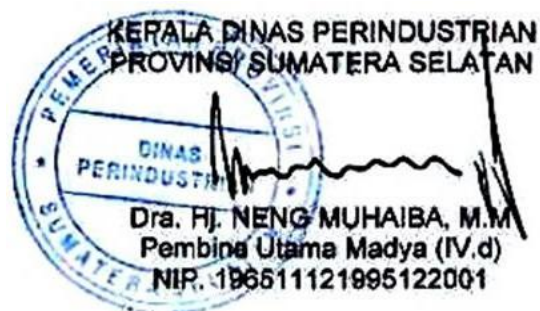
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025, kurun waktu kedua (2) Tahun berdasarkan Renstra Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 – 2026;
- KEDUA** : Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan memuat Sasaran, Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja Kegiatan kurun waktu satu tahun yaitu 2025.
- KETIGA** : Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- KEEMPAT** : Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan melakukan Pemantaun terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA** : Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan mengevaluasi Capaian Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 3 Januari 2025

**KERALA DINAS PERINDUSTRIAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**
Dinas
PERINDUSTRIAN
Dra. Hj. NENG MUHAIBA, M.M.
Pembina Utama Madya (IV.d)
NIP. 196511121995122001

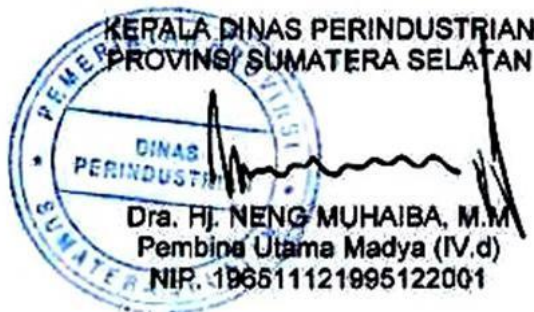
KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmatNya bagi kita semua, sehingga Buku Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan dapat diselesaikan.

Buku ini berisikan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 meliputi program prioritas daerah tahun 2025, rencana program/kegiatan tahun 2025, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu (2024), serta Tujuan, sasaran Program/Kegiatan terhadap kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dan nasional. Data dan informasi yang menjadi bahan evaluasi dalam laporan ini, beberapa masih bersifat sementara dikarenakan saat pengambilan data berlangsung dalam tahun 2024 (tahun berjalan).

Akhir kata, semoga buku Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan ini dapat membantu dan menjadi pedoman bagi semua pihak dalam menjalankan program/kegiatan di tahun 2025 mendatang.

Palembang, 23 Januari 2025



DAFTAR ISI

Halaman Judul	1
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	1
Daftar Tabel	3
Daftar Gambar	4
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Rencana Kerja OPD.....	2
1.1.2 Alur Proses Rencana Kerja OPD	4
1.1.3 Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	6
1.1.4 Hubungan Renja dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumsel	6
1.1.5 Pengurustamaan Isu Perubahan Iklim ke dalam RPJMD Provinsi Sumsel.....	7
1.1.6 Pengurustamaan Isu Gender ke dalam RPJMD Provinsi Sumsel dan Implementasinya dalam Rencana Kerja (Program/Kegiatan) OPD	8
1.1.7 Pengurustamaan Isu Kemiskinan ke dalam RPJMD Provinsi Sumsel	10
1.2 Landasan Hukum	12
1.3 Maksud dan Tujuan	13
1.4 Sistematika Penulisan	13
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2024.....	15
2.1 Evaluasi Pencapaian Program Tahun Lalu dan Perkiraan Tahun Berjalan	15
2.1.1 Evaluasi Program / Kegiatan Bidang Industri	17
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	22
2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	23
2.3.1 Kinerja Perencanaan SKPD	23
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan dalam Penyelengga- raan Tugas Pokok dan Fungsi OPD	24
2.3.3 Dampak Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap Capaian Program Nasional / Internasional..	26
2.3.4 Tantangan dan Peluang	27
2.3.4.1 Tantangan	27
2.3.4.2 Peluang	28
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD	29
2.5 Penelaahan Usul Program dan Kegiatan Masyarakat.	30
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	32
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	36
3.3 Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah	38
BAB IV PENUTUP.....	42
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Persentase realisasi fisik & keuangan tahun 2023 – 2024	15
Tabel 2.2	Perbandingan Rekapitulasi Industri Menengah dan Besar Per Cabang Industri di Sumatera Selatan tahun 2023 – 2024	18
Tabel 2.3	Persentase pertumbuhan industri menengah dan besar tahun 2024	18
Tabel 2.4	Pertumbuhan unit usaha industri Pengolahan Sumsel Tahun 2023 – 2024	19
Tabel 2.5	Perbandingan Rekapitulasi Industri Kecil Formal Per Cabang Industri di Sumatera Selatan 2023 – 2024	20
Tabel 2.6	Perbandingan Rekapitulasi Industri Kecil Non Formal Per Cabang Industri Tahun 2023 – 2024	20
Tabel 2.7	Persentase laju pertumbuhan Industri Kecil Formal dan Non Formal tahun 2024 di bandingkan tahun 2023	21
Tabel 3.1	Tabel Pohon Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025	37
Tabel 3.2	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah 2025	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Grafik realisasi Keuangan APBD Tahun 2023 – 2024	16
Gambar 2.2	Grafik realisasi Fisik APBD tahun 2023 – 2024	16

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong peran dan partisipasi masyarakat. Renja SKPD Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan disusun berdasarkan kewenangan urusannya sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja tahun ke-sembilan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dimana melalui Peraturan Daerah tersebut terbentuklah Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan dari sebelumnya tergabung pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan. Akan tetapi Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 ini sebenarnya adalah penjabaran tahun kedua dari Rencana Strategis Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, khususnya di sektor industri yang merupakan perencanaan yang berkesinambungan dalam upaya pembangunan yang terencana dan sistematis dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Adapun Kegiatan Prioritas Daerah mempedomani program/kegiatan pada Kepmendagri No. 900.1.15.5–1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan lebih lanjut dapat dilihat secara komprehensif dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, sebagai dasar dalam penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah Sumatera Selatan tentang APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025.

Rencana Kerja tahun 2025 ini harus dapat menjadi pedoman bagi pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2025 pada Dinas perindustrian Provinsi Sumatera Selatan agar pencapaian sasaran dan target dari program/kegiatan yang diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

1.1.1. Rencana Kerja OPD

Didalam Rencana Kerja tahun 2025 ini dengan pagu anggaran yang tersedia memuat program / kegiatan / subkegiatan yang bersifat pilihan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas di sektor Industri terutama untuk operasional OPD/Pelayanan Publik. Selain itu ada kegiatan pada program sektor industri yang diprioritaskan untuk penanggulangan inflasi, pengarusutamaan gender, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, pengembangan dan pembinaan IKM, P3DN. Semua program tersebut adalah dalam rangka pembinaan dan pengembangan di sektor industri kecil dan menengah. Untuk pencapaian prioritas daerah lainnya Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan melaksanakannya melalui dana dekonsentrasi dengan program penumbuhan dan pengembangan IKM. Walaupun dengan keterbatasan anggaran yang tersedia pada tahun 2025 tersebut, diharapkan apa yang menjadi sasaran dan target OPD maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat tercapai dengan baik.

1.1.2. Alur Proses Rencana Kerja OPD

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dokumen Renstra Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan dibuat dalam kurun waktu tiga tahun (2024 – 2026), yang memuat arah dan kebijakan serta program kegiatan yang akan dilaksanakan. Dari Renstra yang ada kemudian dijabarkan kembali secara lebih rinci untuk dilaksanakan dalam Rencana Kerja Periode Satu Tahun (Renja) yang akan dibuat setiap tahun selama kurun waktu tiga tahun.

Dalam dokumen Rencana Kerja ini kemudian disusun program/kegiatan yang akan dilaksanakan untuk satu tahun ke depan. Alur perencanaan tersebut dilaksanakan melalui proses koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program/kegiatan (APBD/APBN/DAK) yang diawali dari pelaksanaan Rapat

Koordinasi penyusunan program/kegiatan Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan dengan OPD Dinas Perindustrian kabupaten/kota Se Sumatera Selatan, yang dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepakatan usulan program/kegiatan tersebut kemudian menjadi bahan/masukan dalam menyusun perencanaan program/kegiatan bidang-bidang teknis terkait di dalam lingkungan Dinas Perindustrian Provinsi kemudian akan menyampaikan Usulan Plafon Perencanaan Awal (PPAS) Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun $n+1$ dengan tetap berpedoman/menyesuaikan pada Program /Kegiatan yang telah ada dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan (2024 – 2026). Usulan rencana program/kegiatan tahun $n+1$ tersebut akan melalui tahapan evaluasi/pembahasan baik di dalam lingkungan internal OPD (Dinas Perindustrian) Provinsi, Dinas Perindustrian Provinsi bersama Bappeda maupun DPRD Provinsi Sumatera Selatan sampai kemudian dilakukan penetapan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Usulan dengan dana APBD yang tertuang dalam rencana kerja tahun $n+1$ yang telah diinput pada sistem e-planning OPD dan disetujui (PPAS) akan dibuat dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Tahun $n+1$ (seperti yang termuat dalam lampiran 5 dokumen Renja 2025 ini). Untuk yang isinya berbentuk narasi dan tabulasi yang meliputi evaluasi/perbandingan tahun n berjalan dimuat pada lampiran 3 (Review), dan Rencana awal program/kegiatan OPD tahun n dimuat pada lampiran1.

Sedangkan usulan perencanaan APBN/DAK yang juga dikoordinasikan melalui Rapat Koordinasi OPD diatas akan melalui mekanisme penyaringan penginputan dalam sistem e-planning musrenbangnas untuk selanjutnya dikoordinasikan dan disinkronkan dengan K/L di tingkat pusat sesuai dengan mekanisme perencanaan yang telah ditetapkan di tingkat pusat.

1.1.3. Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana kerja satu tahunan Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian 3 (tiga) tahun program/kegiatan sektor industri yang ada didalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 – 2026. Sedangkan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan *merupakan salah satu penjabaran upaya pencapaian sektor industri dari RPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 – 2026.*

Untuk Rencana Kerja tahun 2025 ini selain berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 – 2026, juga mengacu pada data/informasi pendukung yang bersumber pada:

- Tema RKPD tahun $n+1$ sesuai Tahapan RPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 – 2026 sesuai program prioritas sektor industri.
- Hasil rapat koordinasi/sinkronisasi program/kegiatan sektor industri Kab/Kota untuk tahun $n+1$.
- Usulan Program/Kegiatan perindustrian dari Bidang/UPTD.
- Evaluasi program/kegiatan tahun berjalan atau sebelumnya (tahun n , $n-1$)
- Isu-isu Strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan saat tahun $n+1$.

Pada proses penyusunan dokumen rencana kerja tahun 2025 ini juga mengacu pada dokumen perencanaan lainnya seperti Renstra Kementerian Perindustrian RI tahun 2020 – 2025 serta Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk dokumen Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Selatan yang telah disusun tahun 2015 dan pada tahun 2017 telah selesai diperdakan dengan Perda Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2037, maka didalam Rencana Kerja tahun 2025 ini telah memuat beberapa kegiatan yang mengacu pada indikasi program yang ada dalam RPIP tersebut dalam rangka pembangunan sektor industri di Provinsi Sumatera Selatan.

1.1.4. Hubungan Renja dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumsel

RPIP Sumatera Selatan tahun 2017 – 2037 disusun berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian bahwa setiap Gubernur wajib menyusun Rencana Pembangunan Industri daerahnya masing-masing. Sesuai dengan amanat Undang-undang tersebut juga bahwa dokumen RPIP Sumatera Selatan harus di-PERDA-kan agar perencanaan pembangunan industri yang disusun dapat dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi sesuai dengan pemangku kepentingannya. Kaitannya dengan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Tahun 2025 bahwa Program/Kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja tersebut sudah dapat mengacu pada indikasi program-program dan rencana aksi yang telah disusun dalam dokumen RPIP Sumatera Selatan. Artinya sejak tahun 2018 perencanaan program/kegiatan tahunan dan rencana strategis Dinas Perindustrian sudah diselaraskan dengan dokumen RPIP Sumsel tahun 2017 – 2037.

1.1.5. Pengurustamaan Isu Perubahan Iklim ke dalam RPJMD Provinsi Sumsel

Indonesia adalah negara kepulauan tropis yang perlu melakukan adaptasi untuk mengurangi resiko dampak perubahan iklim dan mengupayakan tindakan mitigasi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dunia. Hal tersebut tertuang dalam komitmen Peraturan Presiden No. 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN – GRK). Indonesia juga sudah menyusun Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim. Pelaksanaan kedua upaya tersebut membutuhkan peran serta daerah, baik yang terkena dampak perubahan iklim, maupun yang berpotensi menurunkan emisi gas rumah kacanya. Selanjutnya upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim perlu diarusutamakan ke dalam rencana pembangunan daerah yang mempunyai kekuatan hukum seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Daerah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki kajian resiko dan adaptasi perubahan iklim yang memetakan dampak perubahan iklim dan upaya adaptasinya di sektor pertanian, pesisir, sumber daya air, dan kesehatan. Provinsi Sumatera Selatan juga telah memiliki Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD – GRK) yang mengidentifikasi emisi GRK saat ini, aksi penurunan emisi, dan target penurunan emisi GRK di tahun 2025 pada sektor pertanian; kehutanan dan lahan gambut; energi; transportasi; industri; dan pengelolaan limbah. Adapun perencanaan program/kegiatan yang dibuat nantinya diharapkan dalam kerangka mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan perubahan iklim (climate compatible development), yang bersifat rendah karbon (low carbon) untuk memitigasi, tahan perubahan iklim (climate resilient) untuk beradaptasi, dan bermanfaat ganda untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim (co-benefit).

Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2014 sampai 2017 melalui program/kegiatan di sektor Industri Agro berupaya turut mendukung penurunan emisi GRK tersebut, yaitu melalui Peningkatan efektifitas kemampuan produksi peralatan serta pembinaan perbaikan kualitas produk bagi IKM-IKMnya. Peran serta semua pihak sangat dibutuhkan dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Penurunan Gas Rumah Kaca (RAD-GRK), baik dalam perencanaan program/kegiatan OPD terkait dan pelaksanaannya. Namun pada tahun anggaran 2025 mendatang OPD belum dapat menganggarkan kegiatan yang mendukung pencapaian penurunan emisi GRK

tersebut karena keterbatasan pagu dana yang tersedia, akan tetapi OPD akan tetap mendukung dan terus mengikuti program/kegiatan yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

1.1.6. Pengurustamaan Isu Gender ke dalam RPD / RPJMD Provinsi Sumsel dan Implementasinya dalam Rencana Kerja (Progam/Kegiatan) OPD

Tiga prinsip pengurustamaan yang menjadi landasan operasional bagi seluruh pelaksanaan pembangunan di Indonesia, yaitu:

1. Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan
2. Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan
3. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Ketiga prinsip pengarusutamaan tersebut diarahkan untuk dapat tercermin di dalam keluaran pada setiap kebijakan pembangunan dan jiwa serta semangat yang mewarnai berbagai kebijakan pembangunan di setiap bidang pembangunan.

Sama halnya dengan prinsip pengarusutamaan yang lain, maka PUG sebagai salah satu prinsip pengarusutamaan dilakukan dengan cara yang terstruktur dan tidak terpisahkan dari kegiatan pembangunan sektoral, tidak mengimplikasikan adanya tambahan anggaran dan dilakukan pada semua sektor terkait namun diprioritaskan pada sektor penting yang terkait langsung dengan isu-isu pengarusutamaan gender.

Dilatarbelakangi oleh semangat tiga prinsip pengarusutamaan yang tertuang di dalam RPJMN tahun 2010 – 2014 dan sebagai tindak lanjut dari amanat Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis OPD, dan Rencana Kerja OPD, maka pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen mewujudkan amanah tersebut dengan melakukan langkah-langkah strategis untuk melaksanakan prinsip pengarusutamaan gender sebagaimana diharapkan, yaitu implementasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di berbagai program/kegiatan serta penguatan kapasitas para perencana di seluruh OPD. PPRG diimplementasikan secara bertahap.

Untuk memperkuat proses penguatan kapasitas para perencana secara intensif dan berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah

melakukan pelatihan PPRG baik di tingkat provinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota. Respon OPD sangat baik, karena PPRG merupakan rencana yang adil bukan saja bagi perempuan, namun juga laki-laki. PPRG memotret persoalan dasar tentang ketimpangan gender dan kerentanan kelompok marginal, mengangkat dalam program untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Respon baik juga ditunjukkan oleh anggota DPRD, dengan dukungan khusus dalam penganggaran responsif gender.

Gerakan PPRG diadvokasikan dalam berbagai kegiatan, baik oleh BAPPEDA maupun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), tidak hanya dalam bentuk peningkatan kapasitas perencanaan dimasing-masing OPD, namun juga perangkat-perangkat regulasi yang akan memperkuat mekanisme pelaksanaan PPRG ini. Koordinasi antara OPD khususnya OPD “*Driver*” (Bappeda, DPPPA, Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Biro Administrasi Pembangunan Setda, dan Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel.

Seiring berjalannya waktu PPRG telah menjadi bagian penting dalam proses perencanaan penganggaran. Namun demikian dalam implementasinya masih terdapat beberapa kekurangan seperti : 1. Data pilah belum tersedia; 2. Kemampuan perencana dalam menyusun analisis gender masih kurang; 3. RPJMD belum mencantumkan indikator dan target kinerja responsif gender serta belum terukur; 4. Tim verifikasi tidak konsisten dan kurang maksimal dalam memverifikasi GAP, GBS dan RKA; 5. Belum ada Panduan Teknis dan instrumen monitoring dan evaluasi, belum pernah dilaksanakan monitoring dan evaluasi PPRG sampai dengan implementasi; dan 6. Kurangnya jumlah fasilitator terlatih.

Berkaitan dengan hal tersebut, agar implementasi Pengarusutamaan Gender di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilaksanakan secara sistematis, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008, Gubernur menetapkan Panduan Teknis Pelaksanaan PUG Skala Provinsi, yaitu Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada Perangkat Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan, kegiatan dilaksanakan melalui pembinaan sektor Industri Kecil dan Menengah pada program/kegiatan APBD dan APBN, baik itu melalui pelatihan bagi IKM maupun pelaku usaha dengan mendorong partisipatif gender.

1.1.7. **Pengurustamaan Isu Kemiskinan ke dalam RPD / RPJMD Provinsi Sumsel**

Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 10,97 persen, menurun 0,81 persen poin terhadap Maret 2023. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2024 sebesar 10,04 persen, turun 1,03 persen poin dari Maret 2023. Sementara untuk wilayah perdesaan, persentase penduduk miskin sebesar 11,53 persen mengalami penurunan 0,68 persen poin dari Maret 2023..

Peranan kelompok makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan kelompok bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) terhadap Garis Kemiskinan (GK) Maret 2024 tercatat sebesar 74,57 persen turun jika dibandingkan kondisi Maret 2023 sebesar 73,84 persen, dan turun jika dibandingkan kondisi Maret 2022 yang sebesar 74,34 persen.

Komoditas makanan yang berpengaruh besar terhadap Garis Kemiskinan di perkotaan relatif sama dengan di perdesaan, diantaranya adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, gula pasir, mie instan, cabe merah, bawang merah, roti, dan kopi bubuk & kopi instan (sachet). Sedangkan komoditas bukan makanan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, perlengkapan mandi, pakaian jadi perempuan dewasa, perawatan kulit, muka, kuku, rambut, dan kesehatan.

Pada periode Maret 2023 - Maret 2024, maupun periode September 2023-Maret 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan. Adapun Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada periode Maret 2023 - Maret 2024 mengalami penurunan, sedangkan periode September 2023-Maret 2024 mengalami peningkatan.

Oleh karena itu dibutuhkan kerja keras dan sinergisitas pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah kabupaten/kota se Sumatera Selatan agar angka kemiskinan di Sumatera Selatan dapat menurun sesuai dengan yang diharapkan, agar berdampak terhadap kesejahteraan penduduk miskin.

Upaya pengentasan kemiskinan memang menghadapi kendala yang tidak ringan, misalnya merosotnya harga komoditi-komoditi unggulan Sumatera Selatan antara lain karet dan sawit, dimana sebagian besar masyarakat menggantungkan pendapatannya komoditas tersebut. Namun demikian Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, pada tahun 2020 sudah menggulirkan **Program Gertak Sejuta Mandiri**”, untuk mengoptimalkan program-program

pengentasan kemiskinan bersama seluruh stakeholder yaitu: Pemerintah, Swasta dan BUMN (CSR), Perguruan Tinggi, NGO dan lain-lain.

Gertak Sejuta Mandiri (Penanggulangan Kemiskinan)

Isu Strategis : Tingginya Angka Kemiskinan

Masalah Utama :

- a) Jaminan dan bansos yang kurang tepat sasaran
- b) Terbatasnya kesempatan kerja dan rendahnya produktivitas tenaga kerja
- c) Banyaknya penduduk miskin yang belum memiliki akses terhadap air bersih layak dan sanitasi layak (jamban)
- d) Minimnya aset yang dimiliki dan terbatasnya aset untuk dikembangkan

Strategi :

- a) Mengoptimalkan jaminan dan bansos
- b) Meningkatkan kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja
- c) Meningkatkan akses air bersih layak dan sanitasi layak bagi penduduk miskin
- d) Meningkatkan aset bagi masyarakat miskin

Program Prioritas Daerah (Arah Kebijakan) :

- a) Mengoptimalkan jaminan dan bantuan sosial (Mandiri I)
- b) Meningkatkan kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja (Mandiri II)
- c) Pemenuhan Infrastruktur dasar (Mandiri III)
- d) Peningkatan aset (Mandiri IV)

Sasaran Program Prioritas Daerah:

- a) Meningkatnya jumlah penerima jaminan & bantuan sosial tepat sasaran
- b) Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas penduduk miskin
- c) Meningkatnya jumlah infrastruktur dasar yang dibangun dikantong kemiskinan
- d) Meningkatnya jumlah aset masyarakat miskin

1.2. Landasan Hukum

Adapun dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja ini antara lain:

- 1) Undang-undang No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 70 Tambahan Negara No. 1814);
- 2) Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421);
- 3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 6) Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 - 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah.
 - 8) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 900.1.15.5.–1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 - 9) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
 - 10) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Perencanaan, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);
 - 11) Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 5 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026
 - 12) Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 47 Tahun 2015 tentang Panduan Teknis Pelaksanan Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan;
 - 13) Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Sumatera Selatan Tahun 2017-2037;

- 14) Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 adalah:

- 1) Sebagai panduan yang terencana bagi aparatur dalam pencapaian pelaksanaan program/kegiatan secara bertahap (tahunan) terhadap target capaian program/kegiatan dalam satu tahun.
- 2) Sebagai pedoman yang bersifat yuridis formal bagi aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada unit kerja yang bersangkutan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 3) Sebagai sarana untuk meningkatkan kerjasama dan keterpaduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan antar bidang maupun unit kerja lainnya dalam rangka mewujudkan sinergi antar bidang/unit kerja melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- 4) Sebagai tolok ukur bagi aparatur pelaksana, perencana maupun pengawasan dalam menganalisis dan mengevaluasi indikator kinerja keberhasilan dari pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan.
- 5) Sebagai koreksi terhadap pelaksanaan pencapaian program/kegiatan setiap tahunnya untuk kemudian diadakan perbaikan di tahun perencanaan selanjutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pencapaian Program Tahun Lalu dan Perkiraan Tahun Berjalan

Untuk tahun anggaran 2024, pagu Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan berjumlah Rp. 12.394.033.455,- yang terdiri dari 4 program, 9 kegiatan dan 45 subkegiatan, dari hasil pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan Tahun Anggaran 2024 realisasi keuangan sebesar Rp. 11.162.857.076,00 atau mencapai 90,07% dan realisasi fisik mencapai 100%. Bila dibandingkan dengan tahun anggaran 2023 realisasi keuangan sebesar Rp.13.225.381.382,- atau mencapai 81,72% dari pagu anggaran sebesar Rp. 16.184.282.741,- dan realisasi fisiknya 100%. Maka dapat disimpulkan bahwa realisasi tahun 2024 lebih tinggi sebesar 8,35% dari tahun 2023. Rincian realisasi keuangan dan fisik dari hasil pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

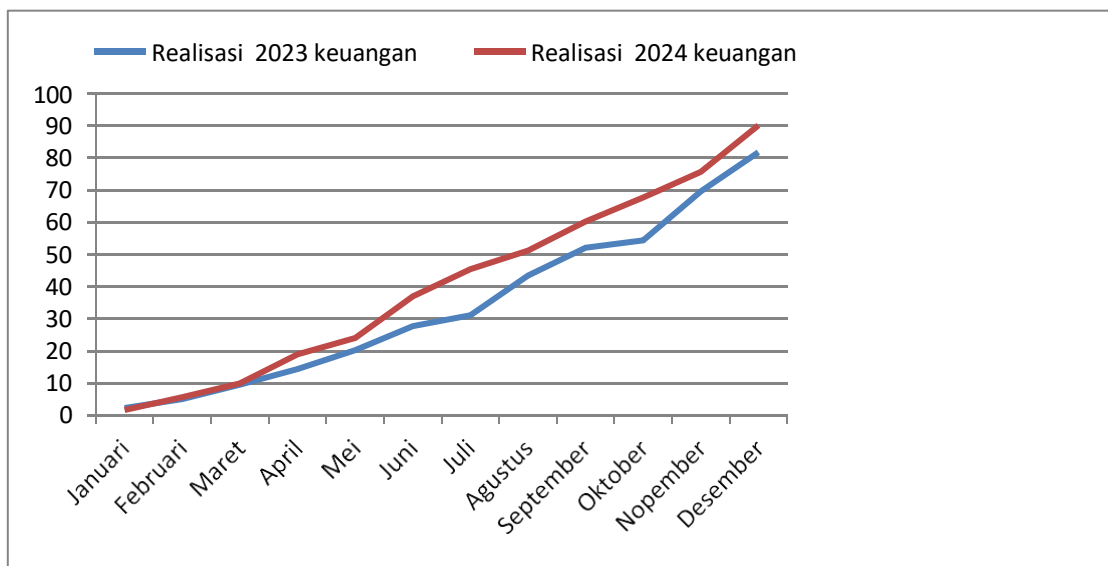
Tabel 2.1
Persentase realisasi fisik & keuangan Tahun 2023 – 2024

Bulan	Realisasi Fisik dan keuangan (%)			
	2023	2024	2023	2024
	Keuangan	Keuangan	Fisik	Fisik
Januari	2.31	1,68	2.60	3,06
Februari	5.03	5,65	5.50	8,19
Maret	9.49	9,89	9.49	9,89
April	14.43	18,96	16.76	23,65
Mei	20.27	24,06	23.34	43,02
Juni	27.75	37,00	25.36	52,01
Juli	31.13	45,42	40.52	57,01
Agustus	43.46	51,14	45.86	61,97
September	52.07	60,25	56.16	70,13
Oktober	54.35	67,73	75.00	79,55
Nopember	69.60	75,63	89.90	92,00
Desember	81,72	90,07	100	100

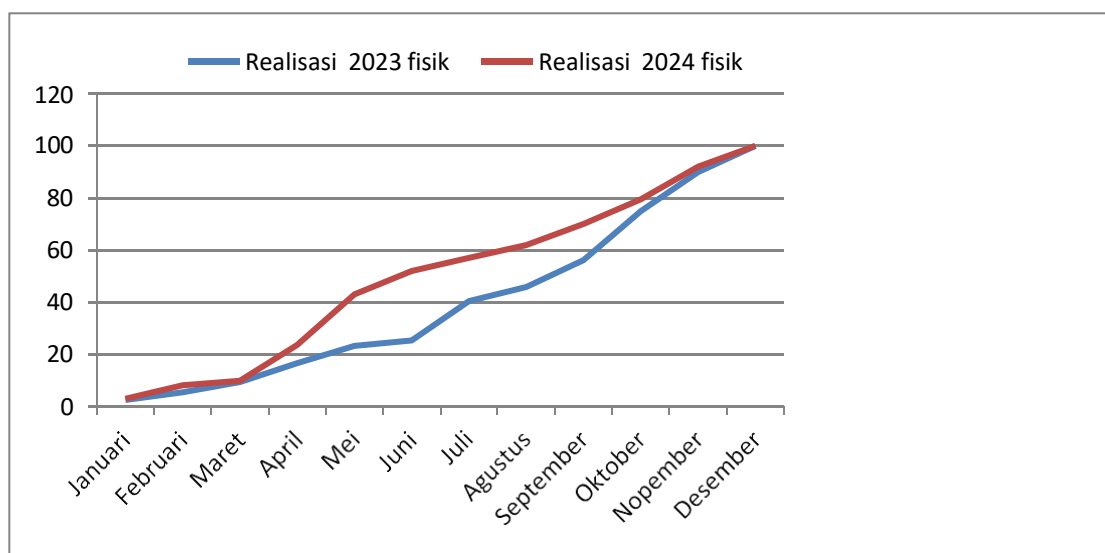
Secara keseluruhan kinerja realisasi keuangan dan fisik pada tahun 2023 dan 2024 sangat dipengaruhi oleh pengelolaan penatausahaan keuangan OPD yang sepenuhnya sesuai dengan sistem yang ada. Aliran kas keuangan yang seharusnya menjadi rencana target pelaksanaan kegiatan berjalan dengan semestinya, dan hal ini berdampak baik terhadap capaian realisasi program/kegiatan yang dijalankan. Gambaran kinerja realisasi ini tidak hanya terlihat pada Laporan Realisasi

Pelaksanaan Program/Kegiatan Perbulan/Triwulanan tetapi juga tergambar pada sistem *e-performance* OPD. Grafik perbandingan realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.1 Grafik realisasi Keuangan APBD Tahun 2023-2024



Gambar 2.2 Grafik realisasi Fisik APBD Tahun 2023-2024



Dari hasil analisa dan evaluasi diatas dan capaian target kinerja perkegiatan, dapat disimpulkan bahwa penatausahaan keuangan yang baik berdasarkan sistem SIPD dan FMIS serta kepatuhan terhadap peraturan yang ada sangat mempengaruhi pelaksanaan program/kegiatan, selain itu SDM aparatur dengan kualifikasi yang baik dan mampu memahami tugas pokok dan fungsinya juga sangat mempengaruhi output yang dihasilkan. Dan diharapkan komitmen untuk upaya perbaikan kinerja pengelolaan pelaksanaan program/kegiatan sangat dibutuhkan terutama pada peningkatan pengetahuan, kemampuan dan profesionalitas SDM aparatur. Dengan kinerja Perangkat Daerah yang optimal maka pencapaian terhadap Visi dan Misi tercapai dengan baik.

2.1.1 Evaluasi Program / Kegiatan

Dengan pencapaian realisasi 90,07% hampir seluruh pelaksanaan program/kegiatan bidang industri mencapai target kinerja yang diharapkan pada tahun anggaran 2024. Beberapa kegiatan secara kuantitatif masih meninggalkan sisa anggaran yang relatif kecil tetapi secara kualitatif telah terlaksana dengan baik sesuai sasaran yang diharapkan.

Dampak pelaksanaan seluruh program/kegiatan dibidang industri yang telah diupayakan mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan juga mendapat dukungan yang baik dari dana dekonsetrasi APBN. Hal ini dilihat pada dinamika perkembangan sektor industri di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024, antara lain:

1. Industri Menengah dan Besar

Target kuantitatif laju pertumbuhan industri Menengah dan Besar yang ditetapkan tahun 2024 ini adalah 3% untuk unit usaha, 4% penyerapan tenaga kerja dan 3% untuk besaran investasi. Kelompok industri menengah dan besar terbagi menjadi dua kelompok industri yaitu kelompok industri dasar dan kelompok industri aneka. Realisasi perkembangan untuk kelompok industri dasar dan aneka tahun 2023, 2024 dan data yang masuk sampai dengan Desember 2024 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Perbandingan Rekapitulasi Industri Menengah dan Besar per cabang Industri di Sumatera Selatan tahun 2023 – 2024

o.	Kelompok Industri	Usaha (Unit)		Tenaga Kerja (org)		Investasi (Rp. 000)	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
A	Industri Dasar	277	284	56.526	56.496	187.771.835.679	256.122.600.591
1	Kertas dan barang cetakan	18	18	5.503	4.933	55.963.957.110	41.472.607.085
2	Pupuk, Kimia & Barang dari Karet	128	126	39.397	39.115	84.737.921.789	90.870.540.980
3	Semen dan galian non logam	33	36	3.949	4.482	19.471.521.880	28.996.775.280
4	Logam dasar, besi dan baja	32	37	2.137	2.282	18.070.426.735	85.241.830.983
5	Alat angkut, mesin & Peralatan	29	30	4.079	4.223	9.458.630.629	9.471.468.727
6	Barang lainnya	37	37	1.461	1.461	69.377.536	69.377.536

B	Industri Aneka	336	353	73.301	76.795	910.905.722.678	916.305.644.289
1	Makanan, minuman & tembakau	238	251	49.125	51.123	900.969.740.815	906.030.455.972
2	Barang Kayu dan hasil hutan	98	102	24.176	25.672	9.935.981.863	10.275.188.317
Jumlah		613	637	129.827	133.291	1.098.677.558.357	1.172.428.244.880

Sumber : Subbag PEP - 2024

Dari data yang masuk sampai dengan Desember 2024 apabila diasumsikan bahwa data yang masuk tersebut dianggap unit-unit usaha yang dapat dihitung sebagai pertumbuhan industri dengan membandingkannya dengan perolehan data tahun 2023, maka dapat dihitung persentase laju pertumbuhan industri menengah besar pada unit usaha, penyerapan tenaga kerja dan besaran investasi yang terserap pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel. 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3 Persentase pertumbuhan industri menengah dan besar tahun 2024

No	Pertumbuhan	Kelompok Industri		
		Industri Dasar	Industri Aneka	Rata – rata Pertumbuhan IMB
1.	Unit Usaha	2,53	5,06	3,79
2.	Tenaga Kerja	- 0,05	4,77	2,36
3.	Investasi	36,40	0,59	18,50

Sumber: Subbag PEP 2024

Pertumbuhan unit usaha Industri Pengolahan Sumatera Selatan pada tahun 2024 ini mencapai 3,79% dari target yang ditetapkan 3%. Peningkatan jumlah unit usaha iringi dengan peningkatan jumlah investasi hanya sebesar 18,50 % dan penyerapan tenaga kerja sebesar 2,36%. Pertumbuhan unit usaha industri pengolahan pada tahun 2024 ini dibandingkan pertumbuhan tahun 2023 yang lalu, dari kontribusi kelompok industri Dasar pertumbuhannya pada cabang industri dengan kontribusi terbesar pada cabang industri logam, besi dan baja sejumlah 5 unit usaha, cabang industri semen dan galian non logam sebesar 3 unit usaha, cabang industri alat angkut, mesin dan peralatan sebesar 1 unit usaha. Sedangkan kontribusi pada kelompok industri aneka terutama pada cabang industri makanan, minuman dan tembakau sejumlah 13 unit usaha dan cabang industri barang kayu dan hasil hutan sejumlah 4 unit usaha. Penambahan unit usaha ini bukan hanya dari investasi unit usaha yang baru melakukan produksi, akan tetapi dari unit-unit usaha yang telah ada tetapi melakukan perluasan atau pengembangan pada unit produksi dengan produk turunan lainnya. Selain itu ada juga unit usaha yang menambah kapasitas produksi

pada jenis produk yang sama, dimana berdampak pada penambahan nominal investasi dan penyerapan tenaga kerja dari unit usaha tersebut.

Untuk perbandingan persentase pertumbuhan unit usaha industri pengolahan tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini:

Tabel 2.4 Pertumbuhan Unit Usaha Industri Pengolahan Sumsel Tahun 2023 – 2024

No	Kelompok Industri	Jumlah unit usaha		Pertumbuhan (%)
		2023	2024	
1.	Industri Dasar	277	284	2,53
2.	Industri Aneka	336	353	5,06
	Jumlah total	613	637	3,79

Sumber: Subbag PEP 2023

Dari tabel diatas, pada tahun 2024 terjadi peningkatan jumlah unit usaha sebanyak 3,79% dengan tingkat pertumbuhan industri aneka 5,06%, lebih besar dari industri dasar yaitu 2,53%. Sampai dengan tahun 2024 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tetap optimis sektor industri pengolahan akan masih menjadi sektor unggulan sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan, dan pertumbuhan unit usaha industri pengolahan non migas dapat mencapai target yang telah ditetapkan 3% per tahun.

2. Industri Kecil

Sasaran/target rata-rata pertumbuhan Industri Kecil ditetapkan pertahun adalah 3% untuk pertumbuhan unit usaha; penyerapan tenaga kerja; dan pertumbuhan investasi. Industri Kecil dibagi dalam dua kelompok yaitu Industri Kecil Formal dan Industri Kecil NonFormal.

Untuk realisasi perkembangan industri kecil formal pada tahun 2024 dan data yang masuk sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini:

Tabel 2.5 Perbandingan Rekapitulasi Industri Kecil Formal Per Cabang Industri di Sumatera Selatan Tahun 2023-2024

No.	Cabang Industri	Unit Usaha		Tenaga Kerja		Investasi	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1.	Pangan	8.019	8.947	34.778	36.464	261.497.043	270.574.864
2.	Sandang dan kulit	1.475	1.583	9.093	9.294	33.501.186	35.109.338
3.	Kimia Bahan Bangunan	4.578	4.693	24.981	25.529	167.473.935	173.102.245
4.	Logam dan Jasa	3.073	3.309	11.905	12.466	110.059.522	107.672.292
5.	Kerajinan Umum	769	1.008	4.662	5.355	16.472.803	19.643.273
Jumlah		17.914	19.540	85.419	89.108	589.004.489	606.102.012

Sumber : Subbag PEP - 2024

Sementara itu realisasi perkembangan industri kecil non formal untuk tahun 2024 dan data yang masuk sampai dengan Desember 2024 dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut ini:

Tabel 2.6 Perbandingan Rekapitulasi Industri Kecil Non Formal Per Cabang Industri Tahun 2023 dan 2024

No.	Cabang Industri	Unit Usaha		Tenaga Kerja		Investasi	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1.	Pangan	27.457	27.457	77.941	77.941	247.320.368	247.320.368
2.	Sandang dan kulit	5.345	5.345	23.958	23.958	53.584.846	53.584.846
3.	Kimia Bahan Bangunan	8.421	8.421	27.190	27.190	115.865.540	115.865.540
4.	Logam dan Jasa	6.669	6.669	12.632	12.632	78.353.687	78.353.687
5.	Kerajinan Umum	5.742	5.742	11.784	11.784	41.358.252	41.358.252
Jumlah		53.634	53.634	153.505	153.505	536.482.693	536.482.693

Sumber Subbag PEP -2024

Untuk persentase laju pertumbuhan industri kecil formal dan industri kecil non formal, dihitung dari jumlah unit usaha, penyerapan tenaga kerja dan besaran investasi yang terserap pada tahun 2023 dibandingkan dengan data yang masuk sampai dengan tahun 2024, dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini :

Tabel 2.7 Persentase laju pertumbuhan Industri kecil formal dan non formal Tahun 2024 dibandingkan Tahun 2023

No	Kelompok Industri	Unit Usaha (%)	Tenaga Kerja (%)	Investasi (%)
A.	Industri Kecil Formal	9,08	4,32	2,90
B.	Industri Kecil Non Formal	0	0	0
	Rata – rata Pertumbuhan Industri kecil	4,54	2,16	1,45

Sumber: Subbag PEP-2024

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan Industri Kecil Formal sampai dengan tahun 2024 dari unit usaha, penyerapan tenaga kerja dan jumlah investasi mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan capaian target yang ditetapkan 3%. Dan untuk Industri Kecil non formal pun sampai dengan tahun 2024 tidak berubah dari data sebelumnya. Laju pertumbuhan tersebut industri kecil non formal berdasarkan pemutakhiran data tahun 2024 tidak diperoleh update data dari 17 kab/kota disebabkan baik pada industri kecil formal dan non formal mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan investasi, tetapi laju pertumbuhan yang ditunjukkan cukup seimbang. Hal Ini bisa diestimasikan bahwa industri kecil yang tumbuh sebagian besar belum merupakan industri padat karya yang membutuhkan tenaga kerja trampil dalam jumlah banyak. Akan tetapi kuatnya komitmen para IKM maupun pelaku usaha untuk membentuk usaha dan semakin terbukanya peluang pasar, serta semakin membaiknya fasilitasi yang dilakukan para fasilitator dalam memajukan IKM atau pelaku usaha baik itu komitmen pemerintah maupun

dari lembaga ataupun swasta/BUMN/BUMD telah mendorong pertumbuhan industri kecil formal pada tahun 2024 ini cukup baik. Untuk pertumbuhan percabang industri, kelompok pangan sebenarnya tumbuh cukup baik tetapi beberapa data unit usaha yang telah ada dilakukan revisi karena belum memenuhi kriteria sebagai industri kecil dan lebih kepada industri kecil non formal. Sementara kelompok sandang dan kulit juga tumbuh perlahan dengan beberapa data unit-unit usaha mengalami revisi ke industri kecil non formal. Sementara ketiga kelompok lainnya yaitu Kimia dan bahan bangunan, logam dan jasa serta kerajinan umum tumbuh dengan sangat baik.

Data yang tersaji diatas belum dapat dievaluasi lebih lanjut mengingat perolehan data dari 17 kab/kota belum valid, dan tidak semua kab/kota menyerahkan data industrinya secara lengkap. Selain itu verifikasi data unit unit usaha yang ada perlu dilakukan verifikasi secara baik oleh sumber data pihak kab/kota sehingga dapat tersaji dengan baik sesuai klasifikasi dan kevalidan data yang tersedia.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam kerangka logika, indikator kinerja utama menggambarkan dampak pembangunan secara total, sebagai hasil pelaksanaan berbagai program & kegiatan. Disamping itu ada indikator kinerja pendukung yang menjelaskan secara rinci tentang pencapaian misi dan tujuan dari pembangunan. Indikator kinerja pendukung secara ideal harus menggambarkan pencapaian program atau beberapa program dalam satu rumpun sejenis. Indikator ini tertuang dalam indikator kinerja pencapaian misi, selanjutnya indikator tersebut dengan analisis yang mendalam dapat dipakai untuk mengukur kinerja SKPD dalam pencapaian visi misinya yang tertuang dalam Renstra SKPD guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi RPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026.

Indikator kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi yang tertuang dalam RPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024–2026 adalah ikut serta dalam pencapaian Misi ke-satu yaitu membangun Sumatera Selatan berbasis ekonomi kerakyatan yang didukung sektor pertanian, industri, UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik diperkotaan maupun dipedesaan. Analisis kinerja Pelayanan SKPD terhadap pencapaian Misi ke-satu pada tahun 2025 ini dapat dilihat dari beberapa pencapaian indikator Kinerja berikut ini yang hasilnya terdapat lampiran 2 dokumen rancangan renja 2025 ini. Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan

2. Jumlah Industri Kecil Menengah
3. Jumlah Industri Menengah Besar
4. Jumlah Industri kreatif
5. Jumlah Sentra Industri Kreatif

Pencapaian kinerja tersebut dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan SKPD baik melalui dana APBD maupun APBN dalam rangka pembangunan dan pengembangan sektor industri. Akan tetapi pencapaian tersebut belumlah optimal dapat menggambarkan secara tegas keberhasilan Perangkat Daerah dalam pencapaian misi dimaksud, hal ini dikarenakan :

- Data/informasi yang berkenaan dengan indikator kinerja diatas kurang lengkap dan belum tertata dengan baik dari bidang/bagian pemberi data, sehingga beberapa indikator kinerja belum ada datanya dan tidak dapat diukur dalam hal pencapaian targetnya.
- Kurangnya kerjasama beberapa bidang/bagian dalam pemberian data /informasi pencapaian indikator kinerja.
- Relevansi antara indikator kinerja yang tersedia dengan program/kegiatan yang dilaksanakan perlu dievaluasi kembali, agar benar – benar tepat dan sesuai sasaran.

Selain ketiga permasalahan diatas, evaluasi terhadap program – program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan isu-isu strategis yang ada, misalnya isu kesetaraan gender, MDGs dan konsep Gas Rumah Kaca (GRK), gender, pencegahan stunting dan pengentasan kemiskinan yang saat ini sudah pada tahap implementasi ke dalam proses perencanaan pemerintah daerah (Provinsi Sumatera Selatan).

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Perencanaan SKPD

Hal yang penting dari kinerja perencanaan Perangkat Daerah adalah bagaimana strategi penyusunan perencanaan itu sendiri dibuat dalam konsep yang SMART untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Perangkat Daerah. Semua upaya tersebut dituangkan dalam perencanaan penyusunan program/kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan hasil koordinasi dan sinkronisasi/kesinergian antara program/kegiatan yang ada di Kab/kota, provinsi maupun pusat.

Kesinergian program/kegiatan antara pusat dan daerah ini dilaksanakan melalui Rapat koordinasi teknis program/kegiatan yang dihadiri oleh Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dari 17 Kab/kota. Dalam rapat teknis ini usulan program/kegiatan

kab/kota yang telah disusun berdasarkan potensi dari masing-masing Kab/kota, yang telah disesuaikan dengan dokumen perencanaan yang ada dan berdasarkan sistem prioritas pembangunan daerah, di selaraskan dengan sasaran dan tujuan dari program/kegiatan yang direncanakan disusun Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya hasil Rapat Teknis ini akan dibahas pada acara Musrenbang Prov. Sumsel. Untuk program/kegiatan yang berhubungan dengan program/kegiatan APBN /DAK, perencanaan Perangkat Daerah telah melakukan penghimpunan dan verifikasi pada rakor teknis Perangkat Daerah sehingga pada Musrenbangnas usulan program/kegiatan prioritas dari kab/kota maupun provinsi dapat dibahas dengan Kementerian terkait.

Kinerja pelayanan perencanaan Perangkat Daerah sendiri tergambar dari sistem perencanaan yang dilaksanakan secara baik sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku atau sesuai dengan ketentuan perundangan dan tatacara sistem penganggaran yang tersedia. Baik itu dari draf penyusunan dokumen perencanaan, pengusulan, evaluasi/pembahasan sampai dengan pencetakan RKA/DPA. Adapun penetapan dan pengukuran kinerja pelaksanaan program/kegiatan tahun 2023 dilakukan melalui penyusunan dokumen kinerja secara khusus melalui proses penyusunan sesuai mekanisme yang berlaku.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi OPD

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengembangan di sektor industri, Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan masih menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan. Kendala tersebut ada yang bersifat internal maupun eksternal, antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Internal

- Pemahaman SDM aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi OPD masih belum optimal sehingga berdampak pada belum maksimalnya kinerja pelayanan publik.
- Tugas pokok dan fungsi OPD yang dalam pendistribusiannya sudah dibagi per SDM aparatur masih belum dipahami dengan baik sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan penjelasan lebih lanjut agar SDM aparatur mengerti tugas, wewenang dan tanggungjawabnya.
- Kemajuan teknologi aplikasi yang saat ini telah diimplementasikan ke dalam proses perencanaan, keuangan maupun pelaporan tidak diimbangi dengan penyediaan aparatur yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya.

- Belum memadainya jumlah SDM aparatur yang memenuhi kualifikasi untuk pengembangan sektor industri.
- Belum terealisasinya secara baik pelaksanaan penetapan Standar Pelayanan Publik atau SOP (Standart Operation Procedure) di lingkungan OPD.
- Masih kurangnya kesempatan bagi SDM aparatur dalam meningkatkan kemampuan/kompetensinya terutama bagi SDM aparatur pembina di bidang teknis.
- Validasi dan ketersediaan data & informasi masih belum lengkap dan tertata dengan baik, hampir di seluruh bidang/subbagian.
- Masih lemahnya koordinasi antar bidang/subbagian.
- Belum optimalnya penerapan teknologi modern untuk re-improvement proses produksi dan kualitas produk IKM sehingga mengurangi daya saing produk tersebut, terutama untuk kualitas ekspor.
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana bagi SDM aparatur dalam pelaksanaan tupoksinya.
- Masih rendahnya aksi SDM aparatur dalam menyikapi isu-isu strategis saat ini seperti GRK (go green), MDG's, pencegahan stunting, gender dan pengentasan kemiskinan, terutama pada implementasinya ke dalam program/kegiatan OPD.

b. Eksternal

- Masih sedikitnya jumlah industri hilir bagi komoditi unggulan Sumatera Selatan
- Masih belum tersosialisasinya Perda Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2037 di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan masyarakat/pelaku industri pada umumnya.
- Masih lemahnya koordinasi dan kerjasama lintas Perangkat Daerah maupun sektor dalam menghadapi isu-isu strategis saat ini, baik itu Hilirisasi Industri maupun gender, pencegahan stunting dan pengentasan kemiskinan.

2.3.3 Dampak Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap Capaian Program Nasional/Internasional

Pada RPD provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 – 2026 Visi Kepala Daerah Provinsi Sumatera selatan adalah mewujudkan "**Sumsel Sejahtera, Unggul dan Terdepan**" Visi tersebut terjabarkan dalam 5 (lima) misi utama, yaitu:

- 1) Membangun Sumatera Selatan berbasis ekonomi kerakyatan yang didukung sektor pertanian, industri UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di pedesaan.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran dan integritas
- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional dan responsif.
- 4) Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.
- 5) Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pada pariwisata religius.

Sejumlah program prioritas yang disusun untuk mendukung pencapaian visi dan misi diatas dirumuskan sebagai berikut:

- Optimalisasi Perlindungan Sosial
- Peningkatan Aset dan Akses Infrastruktur Dasar
- Peningkatan Kesempatan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- Peningkatan Aksesibilitas Daerah dan Desa Tertinggal
- Optimalisasi Pelaksanaan Aksi Konvergensi Stunting
- Peningkatan Ekonomi Kerakyatan
- Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Kedaulatan Pangan
- Peningkatan Investasi, Industri dan Perdagangan
- Pengembangan Seni, Budaya, dan Pariwisata
- Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas
- Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
- Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga
- Pembangunan responsif gender dan perlindungan anak
- Peningkatan Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas
- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (1)

- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (2)
- Peningkatan Akses Energi
- Pemeliharaan Stabilitas Keamanan, Ketertiban Masyarakat dan Kehidupan Beragama
 - Peningkatan kualitas pelayanan publik
 - Pembangunan yang transparan dan akuntabel
 - Peningkatan kualitas aparatur yang profesional dan berintegritas

Dengan dijalankannya program prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi tersebut akan memberikan dampak sangat positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, meskipun beberapa diantaranya berjalan cukup lambat dan masih menyisakan tugas yang sangat berat untuk mencapai target, khususnya yang terkait dengan tujuan pembangunan milenium (MDGs) dan dalam rangka mencapai standar pelayanan masyarakat yang prima.

Dampak yang paling penting dari upaya pencapaian visi dan 5 misi tersebut adalah adanya peningkatan yang cukup signifikan terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat yang tercermin pada peningkatan pendapatan, penurunan tingkat pengangguran dan perbaikan kualitas hidup rakyat. Hal tersebut diwujudkan melalui berbagai program pembangunan baik regional, nasional maupun internasional untuk penanggulangan kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja, peningkatan di bidang pendidikan, kesehatan dan percepatan infrastruktur dasar.

2.3.4 Tantangan dan Peluang

Tantangan dan peluang yang ada dalam upaya peningkatan pelayanan Perangkat Daerah antara lain:

2.3.4.1. Tantangan

- Masih sedikitnya jumlah industri hilir yang ada sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan tumbuhnya industri hilir yang mampu memberikan nilai tambah bagi produk lokal maupun yang berorientasi ekspor.
- Belum optimalnya pembinaan terhadap para pengrajin/wirausaha (IKM/UKM) sehingga produk yang dihasil belum berkualitas daya saing tinggi.
- Belum terealisasinya pembangunan infrastruktur yang memadai pada kawasan industri maupun Pelabuhan Laut, sehingga perlu upaya yang cepat untuk mewujudkannya.
- Belum optimalnya upaya peningkatan SDM Industri di bagian standarisasi, baik melalui program pemberdayaan PPNS maupun bimtek-bimtek yang tersedia.

- Mewujudkan tersedianya Roadmap bagi produk komoditi unggulan Sumsel seperti Karet, CPO dan kopi.
- SDM aparatur yang tersedia perlu diberdayakan secara optimal melalui peningkatan keilmuan, ketrampilan dan profesionalitas sesuai kompetensinya.
- Isu – isu strategis seperti kesetaraan gender, Gas Rumah Kaca (GRK) dan pencapaian MDG's perlu disikapi secara nyata ke dalam program kegiatan SKPD.

2.3.4.2. Peluang

- Stabilitas pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang cukup baik dapat memicu meningkatnya pertumbuhan industri terutama industri pengolahan di Sumsel.
- Event-event yang berskala nasional maupun internasional menjadi daya tarik tersendiri bagi investor dan memacu pembangunan infrastruktur yang lebih maju di Sumsel.
- Terbentuknya Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan mendorong terfokusnya pengembangan sektor industri lebih baik lagi terutama untuk pengembangan potensi perwilayahan industri.
- Adanya Kawasan Ekonomi Khusus Tj. Api-api dan 5 Kawasan Industri serta potensi pengembangan sentra-sentra industri di Sumsel.
- Diperdakannya dokumen RPIP Sumsel lebih terkoordinasi dan selarasnya pembangunan industri di Provinsi Sumsel dan membuka peluang Dana Pusat untuk pembangunan sektor Industri tersebut.
- Sumsel merupakan salah satu penghasil Karet, CPO, Kopi dan batubara terbesar yang merupakan komoditi unggulan Sumsel, sehingga pengembangan industri berbasis agro dan gasifikasi batubara sangat potensial.
- Tersedianya lembaga penelitian dan pendidikan (Balai Riset dan Standarisasi) dan Badan Penelitian dan Inovasi Daerah menunjukkan dukungan pemerintah Provinsi Sumsel terhadap pengembangan komoditi unggulan Sumsel maupun produk-produk industri lainnya, serta teknologi terapan hasil penelitian.
- Pengaruh globalisasi membuka peluang pasar yang cukup luas.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah melalui analisa hasil kebutuhan telah dilakukan berdasarkan potensi yang ada pada Kab/kota di provinsi Sumatera Selatan. Hal ini pun telah dilakukan Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan pada saat dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis dengan utusan aparatur Dinas Perindustrian 17 Kab/kota se Sumatera Selatan dan utusan aparatur Bappeda 17 Kab/kota maupun pihak Bapedda Provinsi Sumatera Selatan.

Dari semua rancangan usulan program/kegiatan yang ada, setelah diadakan rapat pembahasan dengan Bappeda Provinsi Sumsel tidak sepenuhnya dapat di rangkul dalam penetapan rancangan awal perencanaan SKPD 2025 dikarenakan pemilihan program kegiatan berdasarkan sistem prioritas dan sesuai kebutuhan, selain itu juga adanya keterbatasan anggaran. Akan tetapi penetapan program / kegiatan yang ada tetap diselaraskan dengan dokumen perencanaan lainnya dan kepentingan masyarakat.

Selanjutnya hasil analisis disajikan dengan format sebagaimana pada tabel. 3 di halaman lampiran. Pada tabel tersebut antara rancangan awal dengan setelah dilakukan pembahasan dengan Bappeda provinsi Sumsel maupun komisi II DPRD Provinsi Sumsel atau setelah dilakukan penetapan terdapat beberapa perubahan yang cukup signifikan karena adanya efisiensi anggaran salah satu kegiatan yang harus dilakukan untuk kemudian dananya digunakan untuk kegiatan baru yang dibutuhkan untuk dimunculkan pada rancangan akhir penyusunan anggaran. Selain itu beberapa kegiatan, nama kegiatan, lokasi kegiatan, pagu dana maupun parameter indikator kegiatan ada yang mengalami perubahan, baik itu karena adanya efisiensi anggaran dan ada juga karena menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Seluruh dampak/perubahan yang terjadi antara rancangan awal dan rancangan yang terakhir dapat dilihat pada tabel 3 pada lampiran dokumen rencana kerja tahun 2025 ini.

Adapun tema dan prioritas daerah Provinsi Sumatera Selatan pada rancangan awal RKD tahun 2025 yaitu Pembangunan Ekonomi Eksklusif dan Berkelanjutan. Dengan prioritas daerah sebagai berikut:

1. Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Stunting.
2. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Investasi, Industri, Perdagangan, UMKM dan Pariwisata
3. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Madani dan Berprestasi
4. Pemerataan Pembangunan melalui Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, Pelestarian Lingkungan dan Penanggulangan Bencana
5. Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Keamanan

Review terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Tabel T-C. 31 pada lampiran 2. Review Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah terhadap rancangan awal RPD yaitu pada prioritas daerah Pertumbuhan Ekonomi Inklusif didukung oleh Kualitas Infrastruktur, Investasi, Industri, Kebudayaan dan Pariwisata dimana Program Prioritas Daerah dan Kegiatan Perangkat Daerah untuk mendukung ini adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan

- Pengembangan sentra industri kecil dan menengah
- 2. Peningkatan Investasi, Industri dan Perdagangan
 - Perbaikan Iklim usaha dan peningkatan investasi
 - Peningkatan industri berbasis pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang terintegrasi
 - Peningkatan produktivitas dan hilirasi industri non agro didukung sistem bisnis terintegrasi
 - Peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa

2.5 Penelaahan Usul Program dan Kegiatan Masyarakat

Pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan berdasarkan peraturan yang ada dilakukan secara berjenjang mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota ke Provinsi sampai tingkat pusat. Dimulai dari desa/kelurahan yang mengadakan rapat untuk mengajukan usulan ke tingkat kecamatan, di kecamatan diadakan rapat kembali yaitu Musrenbangdes yang mengakomodir usulan rencana program kegiatan yang terpilih atau prioritas. Hasil dari musrenbangdes akan dibawa ke musrenbangcam di tingkat kecamatan, setelah itu hasil musyawarah/rapat musrenbangcam akan dilanjutkan pada Musrenbang Kab/kota.

Musrenbangkab /kota yang diadakan pada Kab/kota diikuti oleh SKPD-SKPD, Kecamatan, tokoh masyarakat dan unsur muspida kab/kota serta Bappeda Kab/kota sebagai koordinator. Pada tingkat ini diharapkan usulan rencana program kegiatan sudah mengakomodir seluruh kepentingan sesuai kebutuhan dengan berdasarkan sistem prioritas. Selain itu usulan program kegiatan tersebut juga harus didistribusikan sesuai pemangku kepentingan atau SKPD terkait. Pada tingkat kab/kota dimana rencana program kegiatan sudah terdistribusi pada pemangku kepentingan atau instansi / SKPD masing-masing, dapat mengajukan beberapa usulan rencana program kegiatan ke pemangku kepentingan / SKPD tingkat Provinsi melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan / SKPD masing-masing yang didampingi oleh Bappeda Provinsi. Pada Rakor Teknis SKPD tingkat Provinsi penyusunan perencanaan program/kegiatan harus sesuai dengan rancangan RKP dan Renstra K/L, mengacu pada fokus dan prioritas yang ada dan adanya Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani SKPD Teknis dan Bappeda baik Provinsi maupun Kab/Kota.

Dari pemangku kepentingan/SKPD tingkat Provinsi, beberapa usulan program kegiatan kemudian diteruskan ke pemangku kepentingan / Kementerian masing-masing atau lembaga di tingkat pusat.

Adapun rencana program kegiatan Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 disajikan dengan format sebagaimana terlampir pada Tabel T-C.29 lampiran 1. Dan pada tahun anggaran 2025 ini Dinas Perindustrian hanya mendapatkan Dana operasional dan program/kegiatan teknis dengan prioritas pembangunan daerah. Sedangkan program/kegiatan pengembangan sektor industri lainnya tidak dapat diakomodir terutama usulan program/kegiatan teknis dari kab/kota dan masyarakat karena keterbatasan anggaran yang tersedia.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran penyelenggaraan Organisasi Perangkat Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian organisasi dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi Perangkat Daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir periode masa jabatan. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah tahun 2025 merupakan implementasi dari tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan tahun ke-2 pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang selanjutnya disajikan dalam tabel pohon kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tabel Pohon Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025

Tujuan	:	Meningkatnya daya saing industri prioritas daerah		
Indikator	:	1. Meningkatkan persentase pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	:	5,15
		2. Meningkatkan pertumbuhan IKM (Industri Kecil Menengah)	:	16.013
		3. Meningkatkan pertumbuhan industri menengah besar	:	576
		4. Meningkatkan pertumbuhan industri kreatif	:	7.328
		5. Meningkatkan jumlah sentra industri	:	43
Sasaran Strategis		Intermediate Outcome 1	Intermediate Outcome 2	
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Unit Usaha Produk IKM Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal	Diversifikasi Produk unggulan daerah (K/K)	Berkembangnya produk unggulan kelompok industri kecil pangan, sandang dan kerajinan umum	
			Berkembangnya produk industri agro unggulan sumsel	
			Terlaksananya peningkatan sarana industri IKM	

		Peningkatan Mutu dan Daya Saing Produk IKM	Terlaksananya peningkatan Pemanfaatan dan Penguasaan Teknologi
			Terselenggaranya promosi dan pengembangan jaringan pemasaran produk industri kreatif
2.	Meningkatnya Investasi Industri Menengah Besar dalam Perwilayahan Industri	Pengembangan infrastruktur industri	Terlaksananya peningkatan fasilitasi dalam pengembangan KPI, KI Kab/kota
			Terlaksananya pembangunan SIKIM baru dan revitalisasi Sentra IKM dalam perwilayahan kab/kota
		Pengembangan industri prioritas Sumsel dalam perwilayahan industri	Terlaksananya peningkatan koordinasi dan kerjasama pengembangan industri lintas sektor
3.	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas SDM Industri daerah	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Industri daerah	Terselenggaranya peningkatan Kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur pembina
			Terlaksananya pembinaan SDM Industri Kecil secara Komprehensif
		Peningkatan Penguatan Regulasi dan Kelembagaan untuk pengembangan industri	Terlaksananya penguatan Regulasi dan Kelembagaan untuk pengembangan industri
			Terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Kinerja OPD untuk pengembangan industri

3.3. Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 mendatang terdiri dari 4 program, 10 kegiatan dan 40 sub kegiatan operasional dan kegiatan teknis bidang Perindustrian dengan pagu dana Rp.17.143.334.900,- yang bersumber pada dana APBD Provinsi Sumatera Selatan. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan

pembangunan dan keuangan daerah. Adapun uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rencana Kerja tahun 2025 pada tabel dibawah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

No.	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	3.31.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
I	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1	3.31.01.1.01.	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>
1)	3.31.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
2)	3.31.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
3)	3.31.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
4)	3.31.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD
5)	3.31.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6)	3.31.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	3.31.01.1.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>
7)	3.31.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8)	3.31.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
9)	3.31.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
10)	3.31.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
11)	3.31.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
12)	3.31.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
13)	3.31.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

No.	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
14)	3.31.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3	3.31.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
15)	3.31.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
16)	3.31.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
4	3.31.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
17)	3.31.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
18)	3.31.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
19)	3.31.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
20)	3.31.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
21)	3.31.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
22)	3.31.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
23)	3.31.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
24)	3.31.01.1.06.11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
25)	3.31.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
26)	3.31.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
27)	3.31.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
28)	3.31.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
29)	3.31.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
30)	3.31.01.1.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
II	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

No.	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
8	3.31.02.1.01	<i>Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</i>
31)	3.31.02.1.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi
32)	3.31.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
33)	3.31.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
34)	3.31.02.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
35)	3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
36)	3.31.02.1.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
III	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
9	3.31.03.1.01	<i>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi</i>
37)	3.31.03.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi
38)	3.31.03.1.01.04	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
IV	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
10	3.31.04.1.01	<i>Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</i>
39)	3.31.04.1.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
40)	3.31.04.1.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan

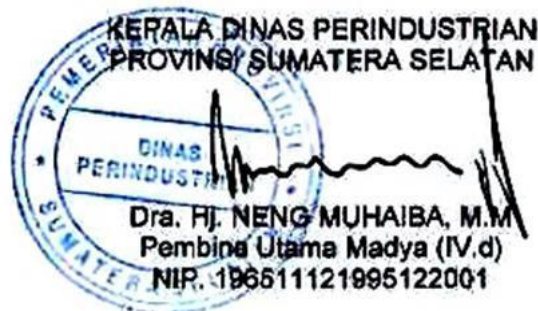
No.	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
		Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja SKPD) tahun anggaran 2025 sebagai kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan harapan :

- a. Sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja SKPD) tahun anggaran 2025 terutama pada program dan kegiatan yang belum tercapai sebagai cerminan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja SKPD) tahun anggaran 2026;
- b. Untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
- c. Untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Palembang, 23 Januari 2025


Dra. Hj. NENG MUHAIBA, M.M
 Pembina Utama Madya (IV.d)
 NIP. 196511121995122001

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Tabel 1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH 2025
PROVINSI SUMATERA SELATAN

OPD : DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS PROVINSI	LOKASI	INDIKATOR KERJA						PAGU INDIKATIF (RIBU RUPIAH)		
				HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD K/K	APBD PROV.	APBN
				TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN											
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	terselenggaranya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi dengan baik.	100%						12.430.862.900	
1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel			<i>terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan baik.</i>	100%				200.000.000	
1)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel					Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen		15.000.000	
2)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen		20.000.000	
3)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel					Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen		15.000.000	
4)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen		20.000.000	

No	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS PROVINSI	LOKASI	INDIKATOR KERJA						PAGU INDIKATIF (RIBU RUPIAH)		
				HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD K/K	APBD PROV.	APBN
				TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen		100.000.000	
6)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen		30.000.000	
2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel			<i>tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel</i>	100%				7.204.889.000	
7)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 orang / bulan		6.817.889.000	
8)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen		250.000.000	
9)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen		50.000.000	
10)	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen		20.000.000	
11)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan		25.000.000	
12)	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen		10.000.000	

No	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS PROVINSI	LOKASI	INDIKATOR KERJA						PAGU INDIKATIF (RIBU RUPIAH)		
				HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD K/K	APBD PROV.	APBN
				TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	1 laporan		12.000.000	
14)	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 laporan		20.000.000	
3	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	Tata Kelola Barang Milik Daerah	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel			<i>tersedianya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dengan baik</i>	100%				70.000.000	
15)	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pelaksanaan Inventarisasi dan Pengolahan BMD yang baik	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen		50.000.000	
16)	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pelaksanaan Inventarisasi dan Pengolahan BMD yang baik	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan		20.000.000	
4	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Peningkatan Kualitas Aparatur Sipil Negara	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel			<i>Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan baik</i>	100%				190.000.000	
17)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 orang		190.000.000	
5	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel			<i>tersedianya administrasi umum perangkat daerah dengan baik</i>	100%				1.529.307.945	
18)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		30.000.000	
19)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		409.307.945	

No	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS PROVINSI	LOKASI	INDIKATOR KERJA						PAGU INDIKATIF (RIBU RUPIAH)		
				HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD K/K	APBD PROV.	APBN
				TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		60.000.000	
21)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		80.000.000	
22)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		40.000.000	
23)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen		10.000.000	
24)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan		900.000.000	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel			tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan baik	100%				2.186.665.955	
25)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan		10.000.000	
26)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan		767.492.845	
27)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan		1.409.173.110	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Barang Milik Daerah	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel			terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan baik	100%				1.050.000.000	
28)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pelaksanaan Inventarisasi dan Pengolahan BMD yang baik	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit		450.000.000	

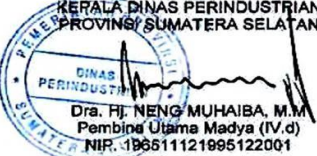
No	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS PROVINSI	LOKASI	INDIKATOR KERJA						PAGU INDIKATIF (RIBU RUPIAH)		
				HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD K/K	APBD PROV.	APBN
				TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pelaksanaan Inventarisasi dan Pengolahan BMD yang baik	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 unit		100.000.000	
30)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pelaksanaan Inventarisasi dan Pengolahan BMD yang baik	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit		500.000.000	
II	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Peningkatan Produktivitas Sektor Industri Pengolahan Daerah Berbasis Sektor Unggulan	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Terlaksananya Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan baik	100%						3.862.472.000	
8	<i>Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</i>	Peningkatan Infrastruktur pendukung industri pengolahan	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel			<i>Terlaksananya Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</i>	100%				3.862.472.000	
31)	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Peningkatan Infrastruktur pendukung industri pengolahan	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel					Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen		100.000.000	
32)	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Peningkatan Infrastruktur pendukung industri pengolahan	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 dokumen		200.000.000	
33)	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Peningkatan Infrastruktur pendukung industri pengolahan	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 dokumen		1.417.472.000	
34)	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Peningkatan Infrastruktur pendukung industri pengolahan	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 dokumen		900.000.000	
35)	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Peningkatan Infrastruktur pendukung industri pengolahan	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen		1.160.000.000	

No	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS PROVINSI	LOKASI	INDIKATOR KERJA						PAGU INDIKATIF (RIBU RUPIAH)		
				HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD K/K	APBD PROV.	APBN
				TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36)	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Peningkatan Infrastruktur pendukung industri pengolahan	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel					Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen		85.000.000	
III	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Peningkatan Produktivitas Sektor Industri Pengolahan Daerah Berbasis Sektor Unggulan	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Terlaksananya Program Pengendalian Izin Usaha Industri dengan baik	230 Industri						350.000.000	
9	<i>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi</i>	Peningkatan Infrastruktur pendukung industri pengolahan	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel			<i>Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi</i>	<i>230 Industri</i>				<i>350.000.000</i>	
37)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Provinsi	Peningkatan Infrastruktur pendukung industri pengolahan	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri dengan skala industri menengah yang lokasinya lintas kab/kota, dan industri besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat.	1 dokumen		175.000.000	

No	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS PROVINSI	LOKASI	INDIKATOR KERJA						PAGU INDIKATIF (RIBU RUPIAH)		
				HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD K/K	APBD PROV.	APBN
				TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38)	Facilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan / standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka Penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Peningkatan Infrastruktur pendukung industri pengolahan	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel					Jumlah Dokumen laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan /standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten / kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kwewnnangan	1 dokumen		175.000.000	
IV	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Peningkatan Infrastruktur pendukung industri pengolahan	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	terlaksananya Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	230 Industri						500.000.000	
10	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Peningkatan Infrastruktur pendukung industri pengolahan	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel			tersediannya Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	230 Industri				500.000.000	

No	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS PROVINSI	LOKASI	INDIKATOR KERJA						PAGU INDIKATIF (RIBU RUPIAH)		
				HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD K/K	APBD PROV.	APBN
				TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39)	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Peningkatan Infrastruktur pendukung industri pengolahan	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 dokumen		250.000.000	
40)	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Peningkatan Infrastruktur pendukung industri pengolahan	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel					Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 dokumen		250.000.000	
											17.143.334.900	

Palembang, 31 Desember 2024



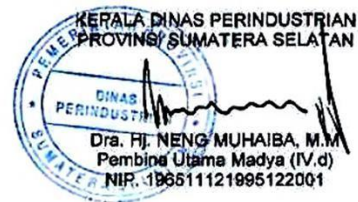
KERALA DINAS PERINDUSTRIAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
 DINAS
 PERINDUSTRIAN
 Dra. Hj. NENG MUHAIBA, M.M.
 Pembina Utama Madya (IV.d)
 NIP. 196511121995122001

Tabel 2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

OPD : DINAS PERINDUSTRIAN
SEKTOR INDUSTRI

NO.	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD			REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI	CATATAN ANALISIS
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2027	
I	URUSAN PERINDUSTRIAN										
1	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan			5,10%	5,15%	5,20%		-	-	-	
2	Jumlah Industri Kecil Menengah			15170	16013	16334		-	-	-	
3	Jumlah Industri Kecil Menengah Besar			560	576	593		-	-	-	
4	Jumlah Industri Kreatif			7.115	7.328	7.548		-	-	-	
5	Jumlah Sentra Industri Kreatif			42	43	44		-	-	-	

Palembang, 31 Desember 2024



 KERALA DINAS PERINDUSTRIAN
 PROVINSI SUMATERA SELATAN
 DINAS
 PERINDUSTRIAN
 Dra. Hj. NENG MUHAIBA, M.M.
 Pembina Utama Madya (IV.d)
 NIP. 196511121995122001

Tabel 3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKPD: DINAS PERINDUSTRIAN

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEGIATAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel			12.427.107.900	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel			10.815.033.455	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel			250.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel			105.000.000	
1)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	15.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	-	
2)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	20.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	-	
3)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	15.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	-	
4)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	20.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	-	
5)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	150.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	50.000.000	
6)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	30.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	55.000.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel			7.442.162.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel			7.120.666.826	
7)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 orang / bulan	7.056.662.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 orang / bulan	6.887.666.826	
8)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	208.000.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	208.000.000	
9)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	90.500.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	-	
10)	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	20.000.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	-	

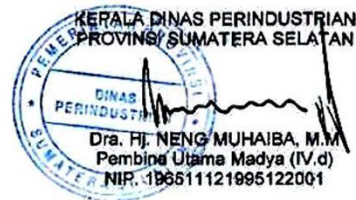
NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEGIATAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	25.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	25.000.000	
12)	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	10.000.000,00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen		-
13)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	1 laporan	12.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	1 laporan		-
14)	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 laporan	20.000.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 laporan		-
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel			40.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel			70.000.000	
15)	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	20.000.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	50.000.000	
16)	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	20.000.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	20.000.000	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel			366.417.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel				-
17)	Pengadaan Pakaian Dinas Berserata Atribut Kelengkapannya	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah	38 orang	220.400.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Berserata Atribut Kelengkapannya	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah	38 orang		-
18)	Koordinasi dan Pelaksanaan Siatem Informasi Kepegawaian	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	1 dokumen	10.000.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Siatem Informasi Kepegawaian	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	1 dokumen		-
19)	Monitoring, Evalluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1 dokumen	10.000.000,00	Monitoring, Evalluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1 dokumen		-
20)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 orang	106.017.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 orang		-
21)	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	3 orang	20.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	3 orang		-
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel			1.469.307.945	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel			1.265.211.695	
22)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	
23)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	409.307.945,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	579.891.695	
24)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	60.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	75.320.000	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEGIATAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	70.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	
26)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	40.000.000	
27)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	10.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	-	
28)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	850.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	505.000.000	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel			1.620.720.955	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel			1.686.665.845	
29)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	10.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	5.000.000	
30)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	696.547.955,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	767.492.845	
31)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	914.173.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	914.173.000	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel			1.238.500.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel			567.489.089	
32)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	400.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	400.000.000	
33)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 unit	188.500.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 unit	88.500.000	
34)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	650.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	53.989.089	
35)	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	-	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	25.000.000	
II	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel			3.655.000.000	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel			1.204.000.000	
8	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel			3.655.000.000	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel			1.204.000.000	
36)	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen	100.000.000,00	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen	50.000.000	
37)	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 dokumen	70.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 dokumen	50.000.000	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEGIATAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38)	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 dokumen	1.400.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 dokumen	444.000.000	
39)	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 dokumen	1.050.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 dokumen	400.000.000	
40)	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	950.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	150.000.000	
41)	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen	85.000.000,00	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen	110.000.000	
III	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel			300.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel			200.000.000	
9	<i>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi</i>	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel			300.000.000	<i>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi</i>	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel			200.000.000	
42)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Provinsi	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri dengan skala industri menengah yang lokasinya lintas kab/kota, dan indstri besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertensu yang menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat.	1 dokumen	150.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Provinsi	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri dengan skala industri menengah yang lokasinya lintas kab/kota, dan indstri besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertensu yang menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat.	1 dokumen	100.000.000	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEGIATAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43)	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan / standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka Penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan / standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten / kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kwewnanagan pemerintah pusat	1 dokumen	150.000.000,00	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan / standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka Penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan / standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten / kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kwewnanagan pemerintah pusat	1 dokumen	100.000.000	
IV	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel			300.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel			175.000.000	
10	<i>Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</i>	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel			300.000.000	<i>Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</i>	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel			175.000.000	
44)	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 dokumen	200.000.000,00	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 dokumen	100.000.000	
45)	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 dokumen	100.000.000,00	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 dokumen	75.000.000	
					16.682.107.900					12.394.033.455	

Palembang, 31 Desember 2024



Tabel 4
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

OPD : DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

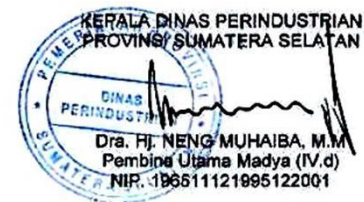
No	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET PENCAPAIAN KINERJA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	terselenggaranya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi dengan baik.	100%	
1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	<i>terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan baik.</i>	100%	
1)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	
2)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	
3)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	
4)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	
5)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	
6)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	
2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	<i>tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel</i>	100%	
7)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 orang / bulan	
8)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	
9)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	
10)	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	
11)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	

No	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET PENCAPAIAN KINERJA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6
12)	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	
13)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	1 laporan	
14)	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 laporan	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	tersedianya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dengan baik	100%	
15)	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	
16)	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan baik	100%	
17)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 orang	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	tersedianya administrasi umum perangkat daerah dengan baik	100%	
18)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
19)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
20)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	
21)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	
22)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	
23)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	
24)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan baik	100%	
25)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	

No	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET PENCAPAIAN KINERJA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6
26)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	
27)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan baik	100%	
28)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	
29)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 unit	
30)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	
II	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Terlaksananya Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan baik	100%	
8	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Terlaksananya Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	100%	
31)	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen	
32)	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 dokumen	
33)	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 dokumen	
34)	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 dokumen	
35)	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	
36)	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen	
III	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Terlaksananya Program Pengendalian Izin Usaha Industri dengan baik	230 Industri	
9	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	230 Industri	

No	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET PENCAPAIAN KINERJA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6
37)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Provinsi	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri dengan skala industri menengah yang lokasinya lintas kab/kota, dan industri besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat.	1 dokumen	
38)	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan / standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka Penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan /standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten / kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 dokumen	
IV	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	terlaksananya Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	230 Industri	
10	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	tersediannya Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	230 Industri	
39)	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 dokumen	
40)	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 dokumen	

Palembang, 31 Desember 2024



**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2025
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**URUSAN : BIDANG PILIHAN
OPD : DINAS PERINDUSTRIAN**

No	Kode Rekening	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET PENCAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET PENCAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3.31.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
I	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>terselenggaranya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi dengan baik.</i>	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	100%	12.430.862.900	APBD		100%	14.168.624.175
1	3.31.01.1.01.	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan baik.</i>	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	100%	200.000.000	APBD		100%	460.000.000
1)	3.31.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 dokumen	15.000.000	APBD		1 dokumen	20.000.000,00
2)	3.31.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 dokumen	20.000.000	APBD		1 dokumen	30.000.000,00
3)	3.31.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 dokumen	15.000.000	APBD		1 dokumen	15.000.000,00
4)	3.31.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 dokumen	20.000.000	APBD		1 dokumen	20.000.000,00
5)	3.31.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 dokumen	100.000.000	APBD		1 dokumen	300.000.000,00
6)	3.31.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 dokumen	30.000.000	APBD		1 dokumen	75.000.000,00
2	3.31.01.1.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel</i>	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	100%	7.204.889.000	APBD		100%	8.708.178.275
7)	3.31.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	38 orang / bulan	6.817.889.000	APBD		38 orang / bulan	8.278.178.275,00
8)	3.31.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 dokumen	250.000.000	APBD		1 dokumen	250.000.000,00
9)	3.31.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 dokumen	50.000.000	APBD		1 dokumen	50.000.000,00
10)	3.31.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 dokumen	20.000.000	APBD		1 dokumen	20.000.000,00
11)	3.31.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	2 laporan	25.000.000	APBD		2 laporan	40.000.000,00

No	Kode Rekening	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET PENCAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET PENCAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12)	3.31.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 dokumen	10.000.000	APBD		1 dokumen	20.000.000,00
13)	3.31.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 laporan	12.000.000	APBD		1 laporan	20.000.000,00
14)	3.31.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 laporan	20.000.000	APBD		1 laporan	30.000.000,00
3	3.31.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	tersedianya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dengan baik	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	100%	70.000.000	APBD		100%	60.000.000
15)	3.31.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 dokumen	50.000.000	APBD		1 dokumen	30.000.000,00
16)	3.31.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 laporan	20.000.000	APBD		1 laporan	30.000.000,00
4	3.31.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan baik	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	100%	190.000.000	APBD		100%	90.000.000
17)	3.31.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	7 orang	190.000.000	APBD		7 orang	90.000.000
5	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	tersedianya administrasi umum perangkat daerah dengan baik	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	100%	1.529.307.945	APBD		100%	1.980.000.000
18)	3.31.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 Paket	30.000.000	APBD		1 Paket	30.000.000,00
19)	3.31.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 Paket	409.307.945	APBD		1 Paket	700.000.000,00
20)	3.31.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 Paket	60.000.000	APBD		1 Paket	200.000.000,00
21)	3.31.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 Paket	80.000.000	APBD		1 Paket	100.000.000,00
22)	3.31.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 Paket	40.000.000	APBD		1 Paket	40.000.000,00
23)	3.31.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 dokumen	10.000.000	APBD		1 dokumen	10.000.000,00
24)	3.31.01.1.06.11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 laporan	900.000.000	APBD		1 laporan	900.000.000,00
6	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan baik	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	100%	2.186.665.955	APBD		100%	1.981.945.900
25)	3.31.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 laporan	10.000.000	APBD		1 laporan	10.000.000,00
26)	3.31.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 laporan	767.492.845	APBD		1 laporan	771.945.900,00

No	Kode Rekening	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET PENCAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET PENCAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27)	3.31.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 laporan	1.409.173.110	APBD		1 laporan	1.200.000.000,00
7	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan baik	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	100%	1.050.000.000	APBD		100%	888.500.000
28)	3.31.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	9 Unit	450.000.000	APBD		9 Unit	700.000.000,00
29)	3.31.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 unit	100.000.000	APBD		1 unit	188.500.000,00
30)	3.31.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 unit	500.000.000	APBD		1 unit	-
II	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Terlaksananya Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan baik	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	100%	3.862.472.000	APBD		100%	7.185.000.000
8	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Terlaksananya Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	100%	3.862.472.000	APBD		100%	7.185.000.000
31)	3.31.02.1.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 dokumen	100.000.000	APBD		1 dokumen	200.000.000,00
32)	3.31.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 dokumen	200.000.000	APBD		1 dokumen	300.000.000,00
33)	3.31.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 dokumen	1.417.472.000	APBD		1 dokumen	2.400.000.000,00
34)	3.31.02.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 dokumen	900.000.000	APBD		1 dokumen	2.100.000.000,00
35)	3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 dokumen	1.160.000.000	APBD		1 dokumen	2.100.000.000,00
36)	3.31.02.1.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 dokumen	85.000.000	APBD		1 dokumen	85.000.000,00
III	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Terlaksananya Program Pengendalian Izin Usaha Industri dengan baik	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	230 Industri	350.000.000	APBD		230 Industri	750.000.000
9	3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	230 Industri	350.000.000	APBD		230 Industri	750.000.000

No	Kode Rekening	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET PENCAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET PENCAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37)	3.31.03.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri dengan skala industri menengah yang lokasinya lintas kab/kota, dan indstri besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertensu yang menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat.	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 dokumen	175.000.000	APBD		1 dokumen	250.000.000,00
38)	3.31.03.1.01.03	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan / standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka Penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah Dokumen laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan /standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten / kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kwewnangan pemerintah pusat	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 dokumen	175.000.000	APBD		1 dokumen	500.000.000,00
IV	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	terlaksananya Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	230 Industri	500.000.000	APBD		230 Industri	800.000.000
10	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	tersediannya Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	230 Industri	500.000.000	APBD		230 Industri	800.000.000

No	Kode Rekening	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET PENCAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET PENCAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39)	3.31.04.1.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 dokumen	250.000.000	APBD		1 dokumen	350.000.000,00
40)	3.31.04.1.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	1 dokumen	250.000.000	APBD		1 dokumen	450.000.000,00
						17.143.334.900				22.903.624.175

Palembang, 31 Desember 2024

KERALA DINAS PERINDUSTRIAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Dra. RI NENG MUHAIBA, M.M
Pembina Utama Madya (IV.d)
NIP. 196511121995122001

